

## **Polri dan Rumah Sakit Sukanto Kramatjati: Tinjauan Program Polmas di Indonesia dalam Bidang Kesehatan dan Pengobatan**

Albertina Rosa Labobar  
Program Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia  
rosana.albertina67@gmail.com

### **ABSTRAK**

Menurunnya kinerja anggota POLRI beberapa tahun yang lalu yang menyebabkan hilangnya citra POLRI di masyarakat membutuhkan sebuah terobosan untuk memperbaiki citra POLRI yang hilang tersebut. Salah satu dari terobosan tersebut adalah pengadopsian konsep Polmas dalam tubuh organisasi Polri. Konsep Polmas tersebut kemudian diejawantahkan kedalam pranata kesehatan yaitu pendirian Rumah Sakit Polri Sukanto, Kramat Jati. Dari pendirian Rumah Sakit Polri Sukanto tersebut ditemukan adanya perbaikan-perbaikan yang berujung pada kembalinya citra POLRI di masyarakat melalui kinerja para anggota POLRI. Rumah Sakit POLRI Sukanto dimiliki sepenuhnya oleh POLRI dan mempekerjakan anggota POLRI sebagai tenaga medis dan sebagian lagi dari anggota masyarakat. Sehingga, dapat diberikan sebuah kesimpulan bahwa penerapan konsep Polmas di organisasi POLRI sangatlah efektif dalam mengembalikan citra POLRI yang menurun beberapa tahun tersebut sebagai sebuah penyelesaian masalah ditubuh POLRI.

**Kata kunci: POLRI, polmas, kemitraan, penyelesaian masalah**

### **ABSTRACT**

*The decreasing of National Police officers' performances that ruined the reputation of National Police in the eyes of the society members over the last years need breakthroughs to fix the reputation of the National Police up. One of the breakthroughs is by the adoption of Community Policing (CP) in the organization of the National Police. The concept of CP is then interpreted in the health institutions by establishing Sukanto Police Hospital in Kramat Jati. Toward the establishment of the hospital, there are findings of improvements that conclude in the coming back of the reputation of the National Police in the eyes of the society members toward the good performances of the police officers. Sukanto National Police Hospital is fully owned by the National Police and employs most of the police officers as paramedics and several people from society members. In sum, it can be concluded that the adoption of CP in the organization of National Police to be considered effective to improve the bad image of the National Police in those last years as a solution to the problem in the body of National Police.*

**Keywords: national police, community policing, Sukanto Police Hospital, partnership, problem solving**

## A. PENDAHULUAN

Keberadaan Polmas di Indonesia adalah suatu terobosan baru dibidang kepolisian yang dinilai memberikan hasil dalam mengatasi permasalahan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Adapun yang menjadi tujuan utama dari Polmas itu sendiri terdiri dari dua jenis yaitu membangun kemitraan (*partnership*) dengan anggota masyarakat dan mengatasi persoalan kamtibmas mengingat adanya ketidakseimbangan antara jumlah personil kepolisian dan jumlah anggota masyarakat.

Ada banyak wujud program polmas di Indonesia. Dalam bidang olahraga, khususnya sepakbola, polmas polri diwujudkan melalui pembentukan Bhayangkara Football Club yang sebelumnya diberi nama Surabaya Football Club (SFC). Bhayangkara Football Club dinilai berhasil dalam program Polmas POLRI karena banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat yaitu dalam bidang olahraga dan kesehatan serta bidang ekonomi. Dalam bidang olahraga dan kesehatan, Bhayangkara FC berhasil membina anggota masyarakat melalui perekrutan bibit unggul dalam sepakbola yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang optimal. Dalam bidang ekonomi, bibit unggul dalam sepakbola juga dijadikan anggota personil POLRI sehingga mereka memiliki gaji bulanan untuk menafkahi keluarganya.<sup>1</sup>

Selain dari pembentukan Bhayangkara FC dalam bidang olahraga dan ekonomi, program Polmas lain yang tak kalah hebatnya adalah keberadaan Rumah Sakit POLRI Sukanto yang terletak di bilangan Kramat Jati, Jakarta Timur. Berdiri diatas yang cukup luas yang merupakan rombakan dari sekolah kepolisian, Rumah Sakit Sukanto Kramat Jati dinilai oleh anggota masyarakat memberikan banyak kontribusi dalam bidang pelayanan kesehatan dan pengobatan.

---

<sup>1</sup>Bhayangkara FC adalah club sepakbola yang di bentuk oleh POLRI sebagai wujud Polmas dan dijadikan Tesis S2 Sekolah Kajian Strategik dan Global Kajian Ilmu Kepolisian oleh Saudara Dicky Anggi Pranata untuk meraih gelar Magister Sains dari Universitas Indonesia.

Rumah Sakit POLRI Sukanto Kramat Jati dinilai efektif dalam membangun kemitraan dengan anggota masyarakat yang secara tidak langsung juga mampu meningkatkan citra polri dimasyarakat.<sup>2</sup> Salah satunya adalah pelayanan kepada anggota masyarakat yang mengikuti program BPJS. Dalam pelayanan kesehatannya, dana operasional rumah sakit ini mutlak dari polri yang dikelola juga oleh anggota POLRI yang berdinis dalam rumah sakit sebagai tim medis seperti dokter dan perawat. Kepemilikan rumah sakit ini adalah 100% dikuasai oleh POLRI.

Dari perspektif Polmas, meningkatnya kepercayaan terhadap POLRI dari anggota masyarakat dinilai sangat mempengaruhi kinerja POLRI, khususnya dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu, penulis dalam penelitian ini ingin mengkaji lebih jauh program Polmas khususnya dalam bidang kesehatan dan pengobatan yang ada di Rumah Sakit POLRI Sukanto Kramat Jati dan dampaknya bagi kinerja anggota yang menjadi tim medis di rumah sakit tersebut.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini sesuai dengan obyek penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ini mengamati sikap dan perilaku manusia yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.<sup>3</sup> Hasil akhir penelitian kualitatif ini adalah data-data deskriptif berupa kata atau pernyataan tertulis dan lisan dari semua orang yang diteliti dalam penelitian ini.<sup>4</sup>

Lebih lanjut dari itu, penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian yang kuantitatif, karena sifatnya adalah eksploratif dengan proses tersendiri. Misalnya, data dalam penelitian kualitatif adalah sumber teori. Dengan kata lain, teori yang

---

<sup>2</sup>Muhammad Faroukh, *Memahami Polmas: Paradigma Baru Perpolisian di Indonesia* (Jakarta: PTIK Press, 2019), hlm 30

<sup>3</sup>Yussy Santoso, *Organization Design and Job Analysis* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 30

<sup>4</sup>Bogdan dan Taylor, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit Remadja Karya, 1975), hlm. 25

digunakan adalah teori yang berbasiskan pada data. Maksudnya, data yang diperoleh dari lapangan digunakan untuk memverifikasi konsep teoritis. Semua ini akan terus dilengkapi dan disempurnakan sepanjang proses penelitian.<sup>5</sup>

### **C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa kompleks Rumkit Bhayangkara TK I.R Said Sukanto berawal dari pengembangan bekas bangunan dan halaman Sekolah Polisi Negara di Kramat Jati dengan luas 13.200 m<sup>2</sup> yang terus berkembang hingga saat ini menjadi 3,62 Ha dengan sarana dan prasarana termasuk jalan tembus Rumkit-Tol Jagorawi. Pada September 2010 Rumkit Bhayangkara TK I.R Said Sukanto telah lulus menjadi Rumkit dengan pengelolaan keuangan-Badan Layanan umum (PK-BLU) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI dan pada November 2010 Rumkit ini telah lulus Akreditasi 16 bidang pelayanan dan Akreditasi Pendidikan Tingkat A.

Rumah Sakit Sukanto memberikan pelayanan kepada pasien rawat inap dan rawat jalan dengan harga yang terjangkau bagi anggota masyarakat. Didalam instalasi rawat inap bagi pasien, terdapat lebih dari 120 kamar yang terbagi kedalam kelas-kelas terpisah seperti VIP, Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3 dan Bangsal sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasien itu sendiri. Selain dari instalasi rawat inap bagi pasien, Rumah Sakit Sukanto juga menyediakan fasilitas instalasi rawat jalan dan pelayanan medis eksekutif. Pelayanan pasien rawat inap dan rawat jalan diperlakukan sangat menyenangkan oleh tim medis yang berdinasi pada Rumah Sakit Sukanto ini seperti yang dinyatakan oleh Iwan Informan Penelitian yang berasal dari anggota masyarakat yakni: “pelayanan rumah sakit Sukanto ini sudah mencapai standar optimal pelayanan rumah sakit swasta di Indonesia. Pasien yang datang dilayani dengan baik oleh tim medis yang juga adalah anggota personil kepolisian. Saya rasa rumah sakit ini akan didatangi lebih banyak pengunjung atas layanannya kepada pasien yang memuaskan.”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Farouk dan Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial Bunga Rampai* (Jakarta: Penerbit PTIK Press, 2003), hlm.15

<sup>6</sup> Wawancara penelitian dengan Informan Penelitian, Iwan pada tanggal 14 November 2019

Bagi pasien yang berasal dari golongan menengah keatas, rumkit ini juga menyediakan layanan medis eksekutif (YANMEDTIF). Khusus layanan medis eksekutif diberlakukan pembayaran yang berbeda. Selain daripada fasilitas layanan kesehatan yang lengkap, rumkit Sukanto ini juga memiliki sarana dan prasarana yang memuaskan bagi pasien maupun pengantar pasien yang mengemudikan kendaraan dengan lahan parkir yang cukup luas.

Program Polmas di Rumah Sakit Sukanto dinilai berhasil karena ditopang oleh beberapa faktor yakni kepemilikan Rumah Sakit Sukanto yang 100% dimiliki oleh POLRI, tatakelola yang diatur oleh anggota POLRI yang merupakan tim medis yang berdinasi di rumkit ini, dan dana operasional yang berasal dari POLRI. Pemolisian masyarakat (Polmas) merupakan sebuah program yang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi Van Meter dan Van Horn<sup>7</sup> yang mengatakan bahwa:

“Untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam sebuah keputusan atau kebijakan maka setiap individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta akan melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai apa yang sudah digariskan atau diputuskan, maka dalam konteks tesis ini bahwa pendirian rumkit Sukanto merupakan refleksi keberhasilan polmas dalam bidang kesehatan dan pengobatan.”

Dari uraian ini penulis menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan yakni pendirian Rumah Sakit Sukanto adalah wujud komitmen anggota personil polisi dalam membangun kemitraan dengan anggota masyarakat, dalam hal ini pasien yang datang ke Rumah Sakit Sukanto. Pemolisian Masyarakat (Polmas) dalam konteks penelitian ini adalah Rumah Sakit Sukanto yang merupakan sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendukung terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan anggota masyarakat. Anggota masyarakat sangat merasakan program Polmas dalam bentuk rumah sakit ini.

“Bila dikaitkan dengan program Polmas POLRI, saya melihat anggota masyarakat sangat antusias mendapatkan layanan medis di rumah sakit

---

<sup>7</sup>Donal Van Meter dan Carl E. Van Horn, “The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work,” *Journal Administration and Society* (1975)

Sukanto ini. Ada beberapa alasan. Pertama, lokasi rumkit yang strategis, biaya yang terjangkau, dan yang terpenting tim medis yang kesemuanya adalah anggota polri yang menjamin ketersedianya kualitas layanan medis yang baik<sup>8</sup>.

Adapun yang menjadi dampak dari wujud Polmas dalam bentuk Rumah Sakit Sukanto ini adalah meningkatnya citra POLRI di masyarakat akibat kinerja anggota personil POLRI yang berdinis sebagai tim medis di Rumah Sakit Sukanto Kramat Jati.

Dari uraian diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa pendirian Rumah Sakit Sukanto Kramat Jati ini didasari atas tiga dasar hukum yakni Perkap Nomor 3 tahun 2015 tentang Polmas dan SK Menkes Nomor 56 tahun 2014 tentang Ijin Pendirian Rumah Sakit. Kedua dasar hukum ini dipayungi oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia terutama dalam Pasal 2 dan Pasal 4.

Jika dikaitkan teori manajemen George R.Terry<sup>9</sup> yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan program dalam konteks ini Rumah Sakit POLRI Sukanto, maka haruslah dimulai dari perencanaan (*planning*) diikuti pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan adanya pengawasan (*controlling*). Maka dalam konteks penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Perencanaan (*planning*)

Dalam konteks pelaksanaan program polmas, maka yang dilakukan adalah sinergitas dua pilar yaitu Polri dan Kementerian Kesehatan dalam melayani kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan dan pengobatan. Hal ini ditegaskan: “Perencanaan kami dalam menjalankan program polmas di rumkit Sukanto ini tidak lepas dari landasan hukum yang telah digariskan oleh undang-undang dan dijalankan oleh institusi yang berwenang seperti Kementerian

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan informan penelitian Eka Darmawan, Camat Kramat Jati, Jakarta Timur pada tanggal 6 November 2019

<sup>9</sup>George R.Terry, *Prinsip- Prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 11

Kesehatan RI sebagai operator yang mengawasi kegiatan operasional di rumah sakit ini.”<sup>10</sup>

Kesiapan atau perencanaan dalam melaksanakan tugas memberikan layanan kesehatan dan medis di rumah sakit Sukanto akan berdampak pada kinerja dari anggota polri yang ditempatkan di wilayah hukum Kramat Jati dalam hal ini warga kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Dalam konteks penelitian tesis ini, aspek perencanaan menjadi perhatian terpenting.

“Dalam hal perencanaan, kami tim medis rumah sakit ini diberikan penyuluhan dan juga dibagikan tugas sebelum terjun ke lapangan sesuai dengan mana yang menjadi tugas Tim medis. Program Polmas Rumah Sakit ini sangat membantu kinerja personil kepolisian dalam membantu permasalahan kesehatan dan pengobatan anggota masyarakat di kecamatan Kramat Jati. Selain itu dukungan dari Camat terhadap pelayanan Rumah Sakit ini kami sudah rasakan. Jadi kami jelas sudah menjalankan program polmas polri dalam bidang kesehatan dan pengobatan.”<sup>11</sup>

Dalam konteks penelitian ini, perencanaan atau persiapan yang dilakukan adalah dengan cara mengikuti penyuluhan, menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan (Hasil Observasi Peneliti).

## 2) Pengorganisasian (*organizing*)

Dalam hal pengorganisasian, yang dilakukan adalah membentuk beberapa tim medis dari sinergitas dua pilar yaitu pihak polri dan kemenkes.

“Fungsi pengorganisasian dilakukan dengan cara membentuk tim medis dengan jumlah kecil dan dipimpin oleh seorang tim, serta didampingi dan diawasi oleh KA Komite Medik.”<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara Penelitian dengan Dr. dr Rusdianto, M.M, M.Si, DFM Kepala Rumah Sakit Sukanto, 12 November 2019

<sup>11</sup> Wawancara Penelitian dengan Kombes Pol Yayok Witarto, Sp.Gk., M.S, Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Perawatan (Kabid YanMedWat) pada tanggal 11 November 2019

<sup>12</sup> Wawancara Penelitian oleh Kombes Pol. Dr. Agung Widjajanto, SpF., DFM, Kepala Bidang Pelayanan Kedokteran Kepolisian (Kabid YanDokPol) , 13 November 2019

### 3) Pelaksanaan (*actuating*)

Inti dari pelaksanaan dalam tata kelola adalah bagaimana bisa menerapkan konsep atau ide dalam proses pelaksanaan. Dalam konteks penelitian ini, tentunya ditekankan pada proses pelayanan kesehatan dan pengobatan pasien yang berasal dari anggota masyarakat yang dilakukan di Rumah Sakit Sukanto, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.

“Dalam melaksanakan program Rumah Sakit Sukanto tentunya tidak bisa lepas dari proses pelayanan kesehatan dan pengobatan pasien yang memiliki masalah kesehatan yang berbeda-beda. Untuk itu perlu dilakukan pengecekan terhadap tim medis yang ada apakah program dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Prosedur itu kami golongkan atas Prosedur Tetap (protap) dan Prosedur Teknis (Pronis).”<sup>13</sup>

Dari data yang didapat penulis terkait dengan konteks penelitian ini, maka didapat dokumen yakni dasar hukum dari pendirian Rumah Sakit POLRI Sukanto yakni Perkap Nomor 3 tahun 2015 tentang Polmas; dan SK Kemenkes.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Polmas dalam bentuk layanan kesehatan dan pengobatan di Rumah Sakit Sukanto yang mengacu pada Perkap Nomor 3 tahun 2015 tentang Polmas dan SK Kemenkes sudah sesuai dengan Protap dan Pronis yang digariskan oleh Kepala Rumah Sakit Sukanto.

“Sebelum melaksanakan tugas lapangan, tim medis kami berikan arahan mengenai prosedur tetap (protap) dan prosedur teknis (pronis) pelaksanaan tugas layanan kesehatan di Rumah Sakit Sukanto ini. Hal ini kami lakukan untuk mencegah terjadinya malpraktek di lingkungan Rumah Sakit ini sehingga mengorbankan pasien yang tidak bersalah.”<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Wawancara Penelitian dengan Kombes Pol. dr. Hibulloh Huda, SPPD, Kepala Bagian Pengawasan Intern (Kabag Was Intern), 10 November 2019

<sup>14</sup>Wawancara Penelitian dengan Kombes Pol. dr Yahya , Sp.P, Kepala Bagian Pembinaan Fungsional (Kabag Binfung) , 13 November 2019.



Oleh karena itu diperlukan komitmen bersama tim medis yang notabene adalah anggota polri yang ditugaskan dalam memberikan layanan kesehatan dan pengobatan serta mengembangkan program ini agar menjadi lebih baik, terutama dalam hal kualitas layanan, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang digunakan.

4) Pengawasan (*controlling*)

Dalam konteks penelitian ini pengawasan atau *controlling* dapat dilihat dari pembagian tugas yang dilakukan oleh kedua pilar dimana dalam hal ini Kepala Rumah Sakit Sukanto memberikan pengarahannya terlebih dahulu kepada tim medis dalam melaksanakan tugasnya.

“Fungsi pengawasan Rumah Sakit Sukanto dilakukan oleh dua pilar yakni POLRI dan Kementerian Kesehatan dan mendapat masukan serta evaluasi dari Dinas Pengawasan Obat dan Makanan wilayah Jakarta Timur. Dalam pelaksanaan evaluasi maka arahan yang kami lakukan ialah ketelitian tim medis dalam memberikan resep obat kepada pasien. Kesalahan tim medis dalam memberikan resep obat akan berdampak pada kinerja operator rumah sakit yang merupakan anggota POLRI.”<sup>15</sup>

Dari uraian diatas seperti pendapat informan penelitian dan telaah dokumen yang diperoleh penulis dalam penelitian ini, maka jika dikaitkan dengan konsep Pemolisian Masyarakat atau Polmas, dapatlah dinyatakan bahwa pendirian Rumah Sakit Sukanto ini, telah sesuai dengan konsep yang dikemukakan Prof. Farouk Muhammad (2019) yang melihat bahwa program Polmas bertujuan untuk membangun kemitraan dengan anggota masyarakat dan memecahkan masalah dalam hal ini adalah masalah kesehatan dan pengobatan pasien yang berasal dari anggota masyarakat.

Polmas di Indonesia telah membuka babak baru tugas perpolisian di Indonesia yang berbeda dari paradigma sebelumnya yang bersifat konvensional. Pendekatan konvensional melihat bahwa kepolisian

---

<sup>15</sup>Wawancara Penelitian dengan Kasubag SDM AKBP Sari Jiwanti, S.Kep, 6 November 2019.

adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung-jawab untuk masalah hukum.<sup>16</sup> Oleh karena itu, prioritas isu bagi seorang polisi adalah masalah kejahatan. Konsekuensinya, peran dominan polisi adalah menyelesaikan masalah kejahatan dan masalah kejahatan yang menjadi perhatian utama adalah kejahatan serius yang melibatkan kekerasan.

Ukuran sukses yang dipakai untuk menilai keberhasilan dari penanganan kejahatan serius tersebut adalah jumlah penemuan dan penahanan pelaku kejahatan. Efektifitas kerja polisi juga diukur berdasarkan waktu respon terhadap setiap laporan atau pengaduan atas terjadinya tindakan kejahatan. Keberhasilan profesionalisme polisi kemudian ditentukan dari respon yang cepat terhadap masalah kejahatan yang serius. Menyadari perannya sebagai pemburu kejahatan, maka setiap polisi wajib menguasai *crime intelligence* (intelijen kejahatan).<sup>17</sup>

Dalam pendekatan konvensional, menurut Faroukh, organisasi kepolisian adalah organisasi yang sangat sentralistik serta melibatkan banyak aturan, regulasi, dan kebijakan serta bertanggung jawab terhadap hukum. Peran markas besar karena itu sangatlah penting untuk membuat aturan dan kebijakan. Terkait dengan bagaimana polisi melihat fungsi pengadilan, maka pengadilan dipandang sebagai tujuan (*goal*) yang penting bagi kesuksesan tugas polisi sebab setiap kasus kejahatan yang diungkap oleh polisi akan diteruskan dan diputuskan oleh pengadilan.

Berbeda dengan perpolisian konvensional, CP, dan atau COP bekerja berdasarkan standar tertentu.<sup>18</sup> Polisi adalah masyarakat dan masyarakat adalah polisi. Yang menjadi prioritas bagi polisi dalam berhubungan dengan lembaga layanan publik lainnya adalah mendukung upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Pendekatan yang dipakai pun diusahakan mampu mencakup area yang lebih luas melalui pendekatan pemecahan permasalahan. Terkait dengan itu,

---

<sup>16</sup>Muhammad Farouk dan Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial Bunga Rampai* (Jakarta: Penerbit PTIK Press, 2003), hlm. 3

<sup>17</sup>Ibid., hlm. 65

<sup>18</sup>Ibid., hlm. 67

efisiensi dari pelaksanaan tugas diukur dari ketiadaan kejahatan karena yang menjadi prioritas utama dari layanan kepolisian (*police services*) adalah masalah-masalah yang menyangkut masyarakat. Dengan demikian, maka perhatian kepolisian pun menjadi sangat erat hubungannya dengan masalah dan isu yang menjadi perhatian masyarakat.<sup>19</sup>

Jika dilihat dari kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat, maka pengadilan hanya menjadi salah satu tujuan diantara sekian banyak tujuan. Efektifitas tugas polisi juga diukur dengan sejauh mana publik mau bekerjasama dengan polisi, sehingga profesionalisme dipahami sebagai keberhasilan profesionalisme dipahami sebagai keberhasilan menjalin dan memelihara kedekatan dengan masyarakat. Agar bisa menjalankan peran tersebut secara maksimal, maka keahlian yang utama dari seorang polisi adalah membangun dan memelihara hubungan dengan masyarakat dan menggali informasi mengenai aktifitas individu dan kelompok. Klien dari pelayanan kepolisian adalah warga masyarakat, sehingga esensi dari akuntabilitas kepolisian ditekankan pada akuntabilitas lokal terkait kebutuhan masyarakat. Karena itu, keberadaan markas besar termasuk mapolda hanya sebagai institusi yang mengajarkan nilai-nilai organisasi termasuk dukungan sumberdaya dan perencanaan strategik.<sup>20</sup>

Dalam konteks penelitian ini, Rumah Sakit Sukanto adalah suatu bentuk Polmas, yaitu keberhasilan polri dalam mendukung upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam layanan kesehatan dan pengobatan anggota masyarakat. Pendekatan ini dinilai efektif karena mampu mencakup area yang lebih luas melalui pendekatan pemecahan permasalahan, khususnya yang terkait dengan layanan kesehatan. Masalah kesehatan adalah salah satu masalah yang hadir ditengah-tengah anggota masyarakat yang perlu penanganan khusus, yaitu anggota polri yang ditugaskan menjadi tim medis atau dikenal dengan kedokteran kepolisian (Dokpol).

---

<sup>19</sup>Ibid., hlm. 68

<sup>20</sup>Ibid., hlm. 71

Ada beberapa keuntungan yang dapat dirasakan oleh anggota Dokpol tersebut. Pertama, anggota masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadinya malpraktek dokter karena Dokpol sebelumnya sudah dibekali dengan undang-undang kesehatan sebelum terjun menjadi dokter. Kedua, status Dokpol tersebut adalah polisi sehingga mudah bagi anggota masyarakat yang melihat adanya penyelewengan dalam layanan kesehatan untuk dapat dilaporkan ke kapolda setempat. Dan yang terakhir, kedinasan para Dokpol adalah dibawah naungan Kapolri dan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan.

Masalah yang diatasi oleh anggota personil kepolisian mencakup lebih besar dan bukan sekadar mengurus tindak kejahatan tetapi juga masalah-masalah lainnya yang menjadi kebutuhan anggota masyarakat, termasuk kesehatan dan pengobatan. Kerjasama dengan insitusi lain seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga merupakan suatu kebutuhan khusus yang harus dilakukan sebagai sebuah solusi. Selain melibatkan BPOM dalam pemberian obat kepada pasien dalam hal menentukan resep obat, hubungan timbal balikpun dapat dilakukan dari pihak BPOM kepada anggota POLRI dalam hal ini Dokpol dalam mengawasi peredaran obat palsu di masyarakat sehingga kedua institusi tersebut dapat menjadi sinergis kekuatan besar.

#### **D. PENUTUP**

Hasil penelitian dan analisis dari penelitian ini telah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah teori dan konsep yang digunakan beserta dengan hasil wawancara *key informant* dan juga sumber lain berupa data yang penulis dapatkan selama observasi dilapangan. Dalam penelitian ini, berdasarkan wawancara informan penelitian, dan data yang diperoleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran polisi di masyarakat sudah berkembang dan tidak hanya mengurus masalah keamanan dan ketertiban masyarakat saja (kamtibmas).
2. Masalah lain selain kamtibmas tersebut adalah masalah kebutuhan anggota masyarakat dalam bidang kesehatan dan pengobatan.

3. Dalam menangani masalah kesehatan masyarakat memiliki pendekatan ataupun tata kelola yang berbeda bila dibandingkan dengan menangani kasus kejahatan.
4. Tata kelola penanganan kesehatan masyarakat harus mengikuti standar umum sebuah rumah sakit pada umumnya, yaitu manajemen rumah sakit.
5. Tim medis yang ada di Rumah Sakit POLRI Sukanto adalah kedokteran polisi yang mendapat tugas khusus dalam menjalankan program Polmas.
6. Pemolisian masyarakat (Polmas) merupakan sebuah program yang didasarkan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
7. Secara teknis, implementasi Polmas mengacu pada:
  - a) Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
  - b) Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/431/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang Pedoman Pembinaan Personel Pengembangan Fungsi Perpolisian Masyarakat (Polmas).
  - c) Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/432/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Operasional Polri Dengan Pendekatan Perpolisian Masyarakat (Polmas).
  - d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008, tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI.
8. Polmas dimaksud adalah pendirian Rumah Sakit POLRI Sukanto, dimana Polisi disini adalah dokter yang ditugaskan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan bagi anggota masyarakat yang merupakan inisiasi dua pilar utama yakni polri dan kementerian kesehatan.

9. Rumah Sakit Sukanto merupakan sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendukung terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan POLRI dan Kemenkes dalam menangani masalah kesehatan anggota masyarakat.
10. Pelaksanaan tata kelola Rumah Sakit POLRI Sukanto yang dilakukan oleh Karumkit, mengusung sinergitas dua pilar dimana bertujuan untuk membantu kinerja dokter dan rumah sakit umum, serta aparat pemerintahan, dalam hal ini Camat Kramat Jati.
11. Dalam melaksanakan tugasnya, Dokpol Rumah Sakit Sukanto selalu diikutkan dalam tugas-tugas polmas dengan terlebih dulu mengikuti tahapan-tahapan: perencanaan tugas, pengorganisasian, pelaksanaan dan Pengawasan atau *controlling*.
12. Pengawasan dapat dilihat dari pembagian tugas yang dilakukan oleh dua pilar dimana dalam hal ini Karumkit memberikan pengarahan terlebih dahulu kepada anggota Dokpol dalam melaksanakan tugasnya.
13. Kebijakan merekrut anggota Dokpol merupakan bentuk dari pelaksanaan perpolisian masyarakat yang bertujuan untuk membangun kemitraan antara anggota POLRI dengan anggota masyarakat.
14. Klien anggota polisi telah berkembang menjadi pasien sebuah rumah sakit, yaitu anggota masyarakat.
15. Dengan memberikan pelatihan, dan juga tugas sebagai Dokpol, maka berdampak pada faktor kinerja kepolisian dalam hal mengatasi masalah (*problem solving*).

Dari kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu kiranya dibuatkan SOP (Standar Operasional Prosedur) secara tertulis dan dibagikan untuk pegangan kepada para Dokpol dalam melaksanakan tugasnya. Termasuk didalamnya adalah kewenangan yang boleh dan yang tidak bagi Dokpol dalam menjalankan tugasnya.
2. Diberikan pelatihan-pelatihan mengenai kesehatan dan pengobatan bagi anggota dokpol.

3. Perlu dibuatkan manajemen yang mencakup manajemen rumah sakit yang melibatkan anggota polri sebagai tim medis, dalam hal ini dokpol.
4. Perlunya penambahan personil POLRI yang bersedia menjadi tenaga medis dirumah sakit Sukanto.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

Bogdan dan Taylor. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Remadja Karya, 1975

George R. Terry. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Muhammad Faroukh. *Memahami Polmas: Paradigma Baru Perpolisian di Indonesia*. Jakarta: PTIK Press, 2019

Muhammad Farouk dan Djaali. *Metodologi Penelitian Sosial Bunga Rampai*. Jakarta: Penerbit PTIK Press, 2003

Yussy Santoso. *Organization Design and Job Analysis*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013

### **2. Jurnal**

Donal Van Meter dan Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work," *Journal Administration and Society* (1975)

### **3. Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat.

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015. Tentang Pemolisian Masyarakat.